

Katalog : 4102004.1276

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BINJAI

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BINJAI**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BINJAI

2017



INDIKATOR KESESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BINJAI 2017

ISBN:

No. Publikasi: 12760.1818

Katalog: 4102004.1276

Ukuran Buku: 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: x + 66 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting

Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Gambar Kover oleh :

Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Dicetak oleh:

CV.Rilis Grafika

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

**INDIKATOR KESESEJAHTERAAN
RAKYAT KOTA BINJAI
2017**

Penanggung Jawab Umum

Ir. Ida Suswati, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Imelda Yamin, SST

Penyunting

Imelda Yamin, SST

Penulis

Pengolah Data

Gambar Kulit

Herlena Simamora, SST

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di bulan Desember ini Badan Pusat Statistik Kota Binjai telah berhasil menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai Tahun 2017.

Publikasi ini memuat penjelasan dan gambaran mengenai unsur-unsur penyusun kesejahteraan rakyat, meliputi aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan, konsumsi dan pengeluaran penduduk perkapita/bulan yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik serta beberapa konsep definisi indikator kesejahteraan rakyat.

BPS sebagai penyedia data statistik dasar termasuk data statistik kesejahteraan rakyat berharap agar publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen data baik individu, perusahaan maupun instansi/lembaga yang membutuhkan serta diharapkan pula dengan terbitnya publikasi ini, segenap masyarakat peka akan fenomena yang terjadi di sekitar melalui kesadaran akan pentingnya melek data yang berkualitas.

Demikianlah publikasi ini disusun, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyusunan publikasi yang lebih baik ke depannya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian publikasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dan meridhoi usaha ini, sehingga memberikan manfaat bagi bangsa dan negara

Binjai, Desember 2018

BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA BINJAI

Kepala,



IDA SUSWATI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Sumber Data.....	4
1.4. Sistematika Penyajian.....	4
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Kependudukan.....	7
2.2. Kesehatan.....	7
2.3. Pendidikan.....	8
2.4. Ketenagakerjaan.....	9
2.5. Taraf dan Pola Konsumsi.....	10
2.6. Perumahan.....	10
BAB III. KEPENDUDUKAN	13
3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	16
3.2. Struktur Umur dan Rasio Ketergantungan	17
3.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio).....	18
3.4. Kepadatan dan Distribusi Penduduk.....	19
3.5. Usia Perkawinan Pertama.....	20
3.6. Keluarga Berencana.....	22
BAB IV. KESEHATAN	23
4.1. Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>).....	26
4.2. Penolong Kelahiran.....	27
4.3. Angka Harapan Hidup.....	29

BAB V. PENDIDIKAN.....	31
5.1. Angka Partisipasi Sekolah.....	35
5.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	36
5.3 Angka Buta Huruf.....	37
BAB VI. KETENAGAKERJAAN.....	39
6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	42
6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	43
6.3. Karakteristik Penduduk Bekerja.....	44
6.3.1. Lapangan Pekerjaan.....	44
6.3.2. Status Pekerjaan.....	44
6.3.3. Pendidikan yang Ditamatkan.....	46
BAB VII. TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	47
7.1 Pengeluaran Rumah Tangga.....	49
BAB VIII. PERUMAHAN	53
8.1. Kondisi Rumah Tinggal.....	56
8.2. Fasilitas Rumah Tinggal.....	58
BAB IX. KEMISKINAN	63
9.1. Perkembangan Penduduk Miskin.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 3.1.	Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2010 & 2017	17
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kelompok Umur serta Beban Ketergantungan, 2017	18
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kota Binjai menurut Kecamatan, 2017	19
Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2017	20
Tabel 3.5.	Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	21
Tabel 3.6.	Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun Berstatus Kawin menurut Status Penggunaan Alat/cara KB Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	23
Tabel 3.7.	Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin menurut Alat/cara KB yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	23
Tabel 4.1.	Persentase Penduduk di Kota Binjai yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan, 2017	27
Tabel 6.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014,2015&2017	42
Tabel 6.2.	Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/kota dan Kegiatan serta TPT dan TPAK, 2017	43
Tabel 7.1.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	50

Tabel 7.2.	Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2017	51
Tabel 8.1.	Kondisi Perumahan di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	57
Tabel 8.2.	Kondisi Fasilitas Rumah di Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	59
Tabel 8.3.	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	59
Tabel 8.4.	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	60
Tabel 9.1.	Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	66

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Binjai (Persen), 2012-2017	16
Grafik 4.1. Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	26
Grafik 4.2. Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	28
Grafik 4.3. Perkembangan AHH Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2015-2017	29
Grafik 5.1. Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Binjai, 2017	35
Grafik 5.2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Binjai, 2017	37
Grafik 5.3. Tingkat Buta Huruf Penduduk Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	37
Grafik 6.1. Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Status Pekerjaan, 2017	45
Grafik 6.2. Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Pendidikan yang ditamatkan, 2017	46
Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kota Binjai, 2017	56
Grafik 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Lantai Terluas Terbuat dari Tanah di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017	58
Grafik 8.3. Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat	61

Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

Grafik 9.1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2012-2017

66

<https://binjaikota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://binjaya.ta.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

1.2. Tujuan

Penulisan Indikator kesejahteraan Rakyat Kota Binjai 2017 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kota Binjai. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian

diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai 2017. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di Binjai, dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek ketenagakerjaan dibahas pada bagian enam. Aspek taraf dan pola konsumsi serta perumahan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Pembahasan ditutup dengan penyajian indikator kesejahteraan rakyat Kota Binjai 2017 pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian sembilan.

BAB II

METODOLOGI

<https://binjaikota.bps.go.id>

METODOLOGI

2.1. Kependudukan

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

2.2. Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya

dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.

- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

2.3. Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

2.4. Ketenagakerjaan

- Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.
- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
- Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

2.5. Taraf dan Pola Konsumsi

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.6. Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini

dusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).

- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

<https://binjajkota.bps.go.id>

BAB III

KEPENDUDUKAN

<https://bit.ly/ta.1999.id>

KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

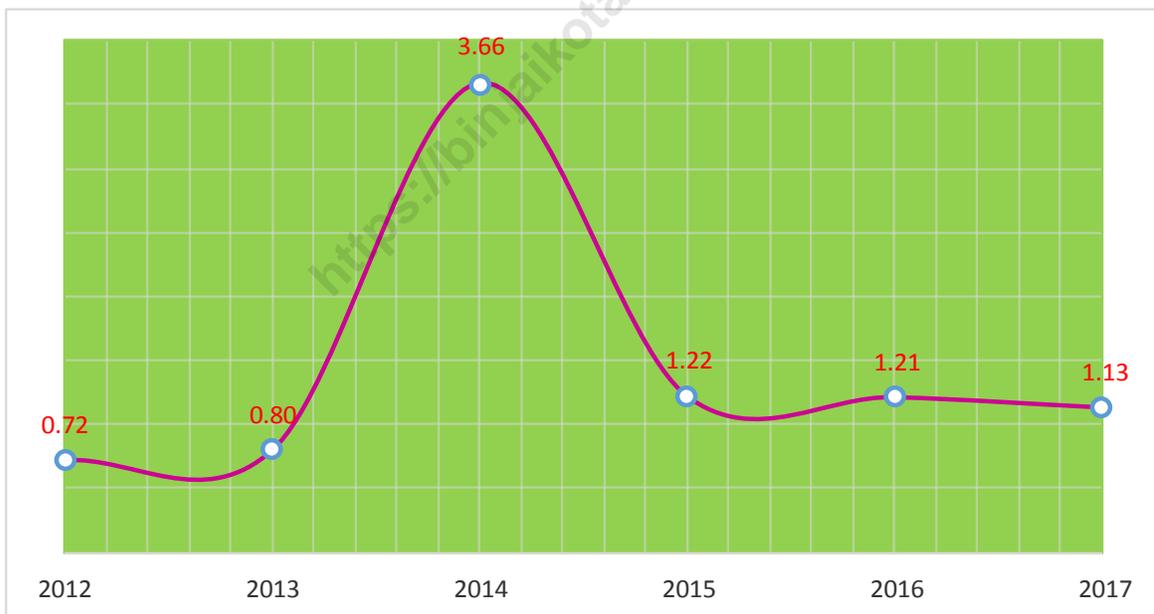
Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Binjai tercatat sebesar 246.154 jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk selama beberapa tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2012 pertumbuhan penduduk tercatat 0,72 persen kemudian meningkat menjadi 0,80 pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 3,66 persen pada tahun 2014. Namun angka laju pertumbuhan penduduk tersebut pada tahun 2015 turun menjadi 1,22 persen dan menurun lagi menjadi 1,21 persen pada tahun 2016. Selanjutnya tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Binjai adalah sebesar 1,13 persen (Grafik 3.1). Diproyeksikan pada tahun 2017 jumlah penduduk Binjai berjumlah 270.926 jiwa seperti tercantum pada Tabel 3.1.

Grafik 3.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Binjai (Persen), 2012-2017



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2013-2018

Jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2017 mencapai 270.926 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 1,13 persen. Jumlah rumah tangga yang ada di Kota Binjai sebesar 62.213 rumah tangga dengan dengan rata-rata anggota rumah tangga

sebesar 4 yang berarti secara rata-rata setiap rumah tangga di Binjai mempunyai anggota rumah tangga sekitar 4 orang.

Pada tabel 3.1 terlihat bahwa Kecamatan Binjai Utara merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2017 penduduk Binjai Utara berjumlah 77.931 jiwa dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 orang. Kecamatan lain yang juga memiliki jumlah penduduk cukup besar adalah Kecamatan Binjai Timur yaitu berjumlah 59.910 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Binjai Kota merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni berjumlah 28.602 jiwa.

Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2010 & 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2010	2017
(1)	(2)	(3)
Binjai Selatan	48 423	55 316
Binjai Kota	30 190	28 602
Binjai Timur	53 926	59 910
Binjai Utara	70 392	77 931
Binjai Barat	43 223	49 167
Kota Binjai	246 154	270 926

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018

3.2. Struktur Umur dan Rasio Ketergantungan

Struktur umur penduduk dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu: kelompok umur muda (dibawah 15 tahun), kelompok umur produktif (15-64 tahun), dan kelompok umur tua (65 tahun keatas). Pada tahun 2017 sebagian besar penduduk Kota Binjai adalah kelompok usia produktif (15-64 tahun), karena mencapai 184.815 jiwa atau 68,22 persen, kemudian kelompok anak-anak

(0-14 tahun) mencapai 74.466 jiwa atau 27,48 persen dan kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai 11.645 jiwa atau 4,30 persen.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kelompok Umur serta Beban Ketergantungan, 2017

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 15	38 075	36 391	74 466
15 - 64	91 771	93 044	184 815
65 +	5 357	6 288	11 645
Jumlah	135 203	135 723	270 926
Rasio Ketergantungan			46,59

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa rasio ketergantungan Kota Binjai tahun 2017 termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 46,59 persen, artinya setiap seratus orang berusia kerja/produktif di Kota Binjai mempunyai tanggungan sebanyak 46 atau 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

3.3. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2017 diketahui jumlah penduduk Binjai adalah sebesar 270.926 jiwa yang terdiri dari 135.203 jiwa laki-laki dan perempuan 135.723 jiwa atau dengan sex ratio sebesar 99,62 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 atau 100 penduduk laki-laki.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kota Binjai menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binjai Selatan	27 335	27 981	55 316	97,69
Binjai Kota	13 987	14 615	28 602	95,70
Binjai Timur	29 757	30 153	59 910	98,69
Binjai Utara	39 097	38 834	77 931	100,68
Binjai Barat	25 027	24 140	49 167	103,67
Binjai	135 203	135 723	270 926	99,62

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018

3.4. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Salah satu masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing Kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah perdesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakteraturan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Dilihat dari kepadatan penduduk, kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Binjai Kota yang mencapai 6.942 jiwa per km². Dengan luas wilayah terkecil di antara kecamatan-kecamatan

lainnya yaitu hanya seluas 4,12 km². Kecamatan Binjai Kota merupakan sasaran hunian masyarakat karena merupakan pusat perkotaan di Kota Binjai. Adapun kepadatan penduduk di kecamatan lain adalah Kecamatan Binjai Barat yaitu sebesar 4.527 jiwa per km², Kecamatan Binjai Utara yaitu sebesar 3.304 jiwa per km², Kecamatan Binjai Timur yaitu sebesar 2.761 jiwa per km² dan kepadatan penduduk terendah ada di kecamatan Binjai Selatan yang hanya mencapai 1.846 jiwa per km².

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Distribusi Penduduk
Kota Binjai menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Distribusi Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Binjai Selatan	55 316	1 846	20,42
Binjai Kota	28 602	6 942	10,56
Binjai Timur	59 910	2 761	22,11
Binjai Utara	77 931	3 304	28,76
Binjai Barat	49 167	4 527	18,15
Binjai	270 926	3 003	100,00

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018

3.5. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, defenisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya melahirkan anak.

Berdasarkan Tabel 3.5 sebagian besar usia saat perkawinan pertama adalah 19-24 tahun (60,70 persen) kemudian diikuti usia 25-34 tahun (20,84 persen) dan usia 17-18 tahun (13,46 persen). Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa masih ada sebanyak 4,55 persen wanita berumur 10 tahun ke Atas yang usia pada perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun dan dinilai masih terlalu muda.

Tabel 3.5. Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

Usia Perkawinan Pertama	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
10 – 16	5,06	4,55
17 – 18	14,51	13,46
19 – 24	58,39	60,70
25 – 34	21,38	20,84
35 +	0,66	0,44

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018

Dibandingkan dengan Kota Binjai, sebagian besar usia saat perkawinan usia pertama Provinsi Sumatera Utara adalah 19-24 tahun sebesar 58,39 persen, kemudian diikuti usia 25-34 tahun (21,38 persen), usia 17-18 tahun (14,51 persen), usia 10-16 (5,06 persen), dan usia 35+ (0,66 persen). Persentase penduduk wanita kota Binjai yang usia perkawinan pertamanya 10-18 tahun sebanyak 18,01 persen, lebih kecil dibanding Propinsi Sumatera Utara (19,57 persen). Padahal usia yang terbaik untuk menikah menurut BKKBN berusia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun laki-laki. Pernikahan dini banyak membawa kerugian bagi wanita, dari sisi psikologis, fisik maupun biologis. Dari sisi psikologis, belum siapnya menghadapi tanggung jawab yang

harus diimbun seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang. Selain itu, remaja yang menikah dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Sehingga kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi.

3.6. Keluarga Berencana

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan cukup lama. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin melambat. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan isteri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin, yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB Kota Binjai pada tahun 2017 sebesar 47,48 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Sumatera Utara sebesar 45,59 persen. Dari persentase wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tersebut di antaranya menggunakan alat/cara suntik (40,08 persen), pil KB (27,88 persen), spiral (6,42 persen), susuk KB & implan (12,36 persen), MOW (7,31 persen), kondom (1,88 persen) dan lainnya (4,07 persen). Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntik secara keseluruhan, disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai dan mudah pemakaiannya.

Tabel 3.6. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

Status Penggunaan	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
Sedang menggunakan	45,59	47,48
Tidak menggunakan lagi	11,61	11,25
Tidak pernah menggunakan	42,80	41,27
Sumatera Utara	100,00	100,00

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018

Tabel 3.7. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

Status Penggunaan	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
MOW/MOP	9,34	7,31
IUD/AKDR/Spiral	3,97	6,42
Suntik	47,45	40,08
Susuk KB & implan	10,49	12,36
Pil KB	21,59	27,88
Kondom/Intravag	1,72	1,88
Lainnya	5,44	4,07
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018

BAB IV KESEHATAN

<https://binjaikolaborasi.go.id>

KESEHATAN

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

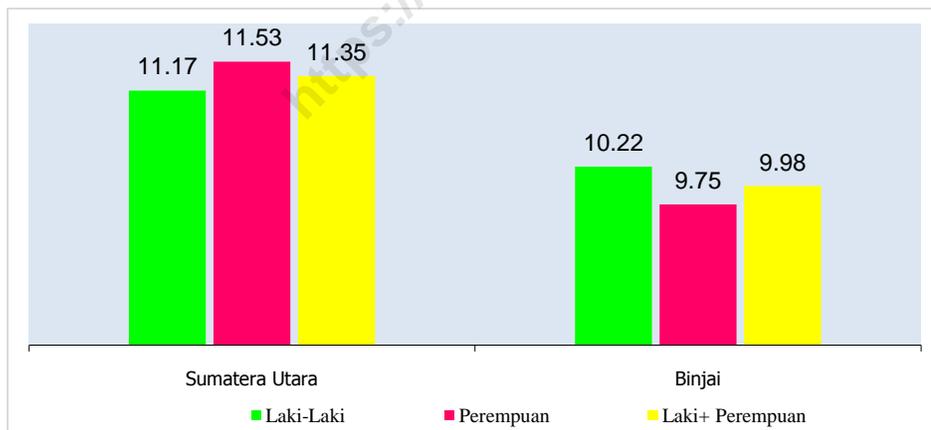
Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

4.1. Angka kesakitan (*Morbidity Rate*)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Tingkat morbiditas di Kota Binjai lebih rendah dibanding Provinsi Sumatera Utara. Tingkat morbiditas Kota Binjai sebesar 9,98 persen dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 11,35 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terdapat pola yang berbeda antara Kota Binjai dan Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara umumnya perempuan lebih banyak menderita sakit, persentase penduduk perempuan yang menderita sakit yaitu 11,53 persen lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki sebesar 11,17 persen. Berbeda dengan Provinsi Sumatera Utara, tingkat morbiditas penduduk perempuan di Kota Binjai yaitu 9,75 persen, lebih rendah dari pada tingkat morbiditas laki-laki yaitu sebesar 10,22 persen.

Grafik 4.1. Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri

merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan.

Pada Tabel 4.1. diketahui bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan untuk mengobati sakitnya adalah sebesar 59,53 persen. Kemudian jika ditelusuri kembali terkait alasan kenapa tidak berobat jalan, memang pilihan untuk berobat sendiri berdasarkan pengetahuannya untuk mengobati penyakit merupakan penyebab utama yakni mencapai 58,99 persen. Penyebab lainnya yang cukup besar adalah merasa tidak perlu dan permasalahan biaya. Terkait dengan permasalahan biaya sebenarnya saat ini pemerintah telah menyusun Undang-undang terkait jaminan sosial.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk di Kota Binjai yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan, 2017

Jenis Kelamin	Persentase yang Berobat Jalan	Alasan Utama tidak Berobat Jalan			
		Tidak punya biaya berobat	Mengobati Sendiri	Merasa tidak perlu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	57,79	2,20	56,18	31,72	9,90
Perempuan	61,17	5,94	61,88	19,73	12,44
Laki-Laki +Perempuan	59,53	4,04	58,99	25,81	11,15

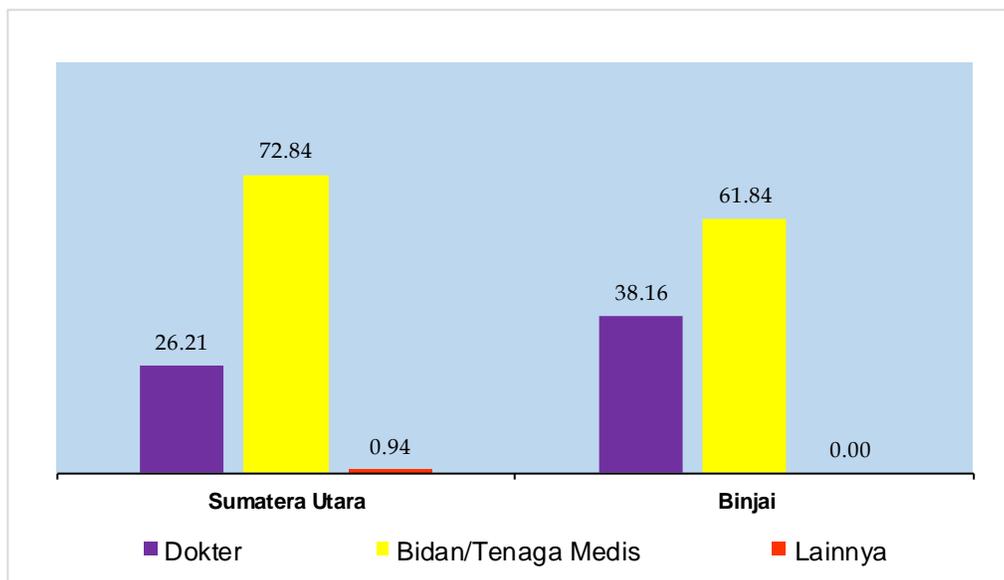
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

4.2. Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga media seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Pada tahun 2017 penolong kelahiran balita di Binjai pada umumnya adalah bidan/tenaga medis lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dimana penolong kelahiran anak lahir hidup terakhirnya ditolong oleh bidan/tenaga medis lainnya adalah sebesar 61,84 persen. Tingginya persentase kelahiran yang ditolong oleh bidan, sangat mungkin disebabkan ketersediaan dan tingkat kepercayaan terhadap bidan relatif tinggi. Tenaga penolong kelahiran lainnya yang cukup tinggi adalah dokter terutama di daerah perkotaan. Dokter sebagai penolong kelahiran di Binjai sebesar 38,16 persen lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 26,21 persen.

Grafik 4.2. Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

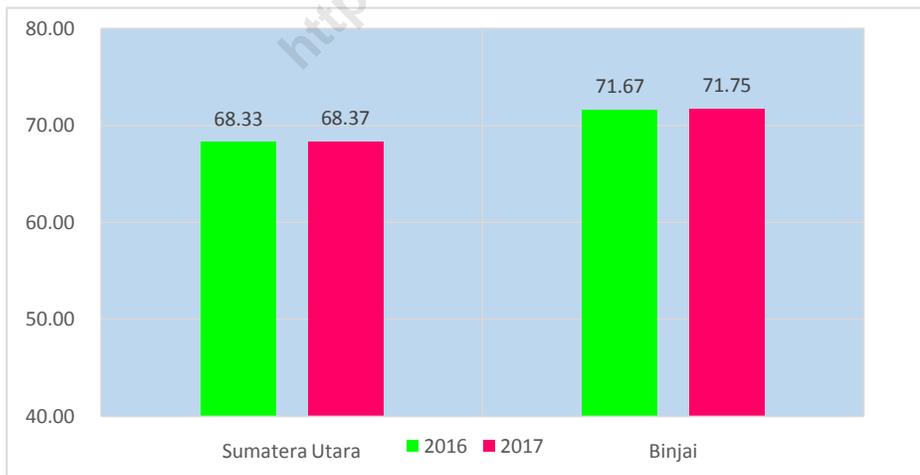


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

4.3. Angka Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Grafik 4.3. menunjukkan Perkembangan AHH Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016-2017. AHH Kota Binjai lebih tinggi dari AHH Provinsi Sumatera Utara. Meskipun demikian, AHH Binjai mengalami peningkatan 0,08 point dari 71,67 di Tahun 2016 menjadi 71,75 pada tahun 2017.

Grafik 4.3. Perkembangan AHH Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016-2017



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan

terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

<https://binjaitkota.bps.go.id>

BAB V

PENDIDIKAN

<https://binjaikobooks.go.id>

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di tengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. kebijaksanaan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, di antaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah.

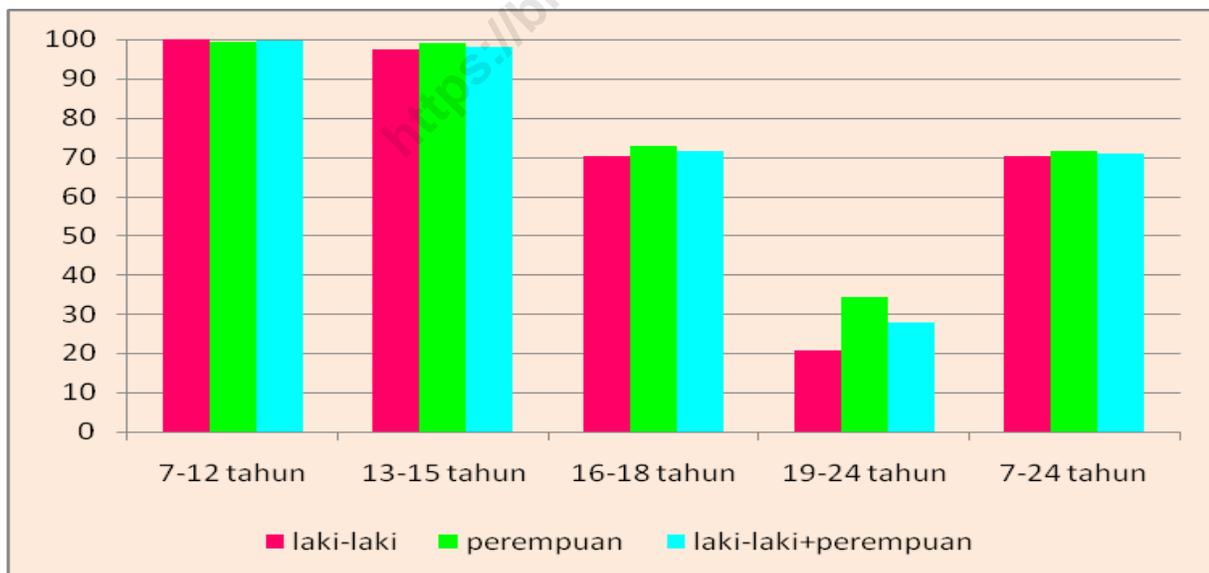
Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

5.1. Angka Partisipasi Sekolah

5.2.

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi

Grafik 5.1. Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Binjai, 2017



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018

Grafik 5.1. menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Kota Binjai. Pada usia 7-12 tahun tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan (99,3 persen) lebih rendah dengan

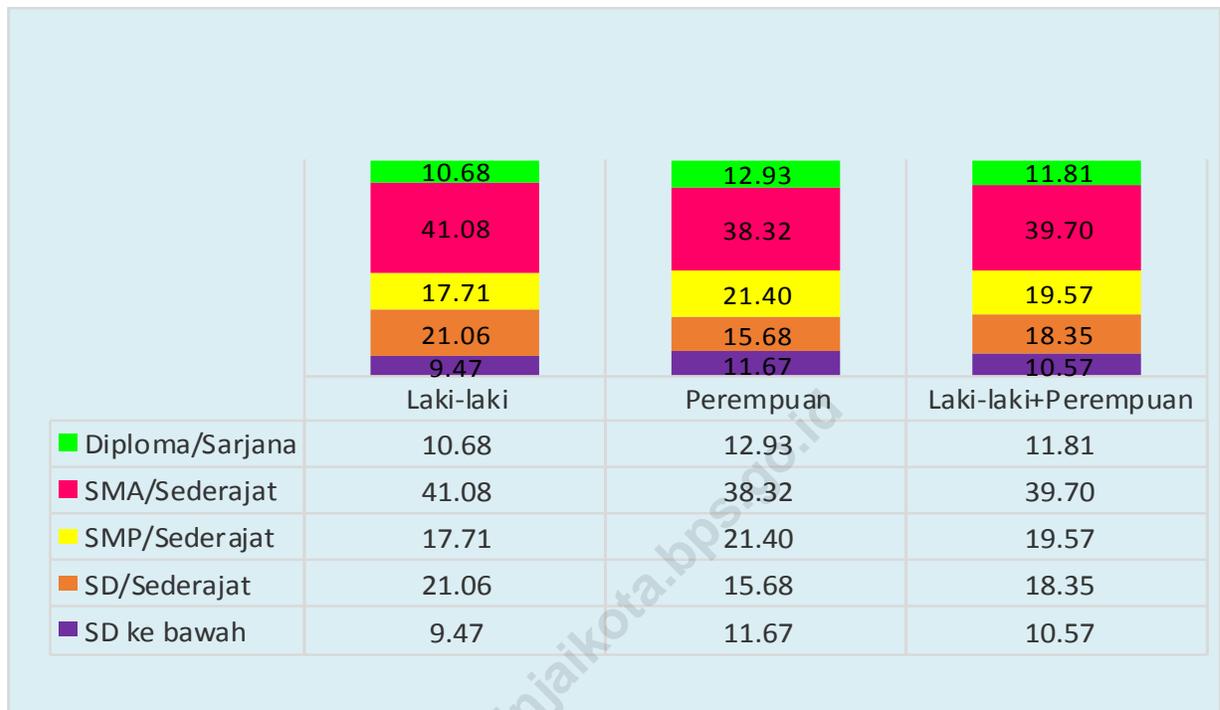
tingkat partisipasi sekolah penduduk laki-laki (100,00 persen) di tahun 2017. Pada usia 13-15 tahun tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan (99 persen) lebih besar daripada tingkat partisipasi sekolah penduduk laki-laki (97,4 persen). Pada kelompok umur 16-18 dan 19-24 tahun tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki. Dan secara keseluruhan pada kelompok umur 7-24 tahun tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan (71,6 persen) lebih besar daripada tingkat partisipasi sekolah penduduk laki-laki (70,2 persen).

5.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Berdasarkan Grafik 5.2., persentase penduduk laki-laki 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA/Sederajat di Kota Binjai pada tahun 2017 adalah sebanyak 41,08 persen lebih rendah dibanding perempuan yaitu 38,32 persen. Sebaliknya, persentase penduduk laki-laki yang berpendidikan Diploma/ Sarjana (10,68 persen) lebih rendah dibandingkan persentase penduduk perempuan (12,93 persen).

Grafik 5.2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Binjai, 2017

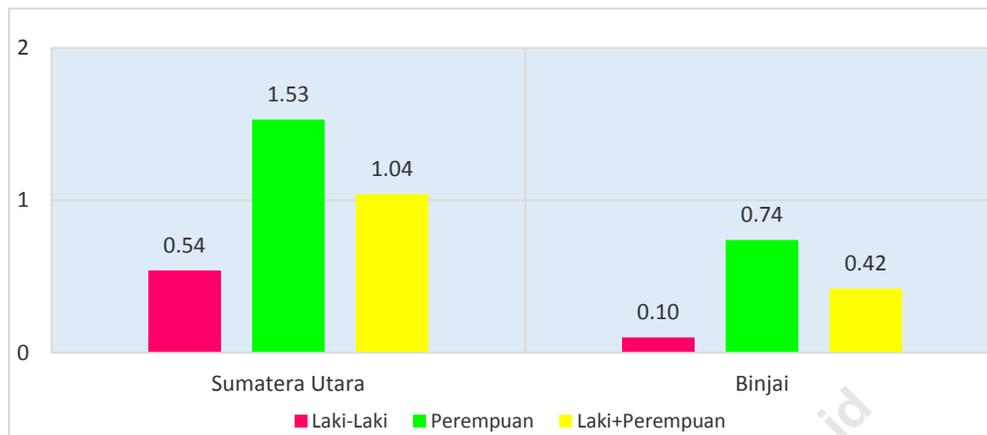


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

5.4. Angka Buta Huruf

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis atau sebaliknya (buta huruf) untuk penduduk 10 tahun. Tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa

Grafik. 5.3. Tingkat Buta Huruf Penduduk Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Tahun 2017, tingkat buta huruf penduduk laki-laki Kota Binjai lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara dengan selisih 0,44 persen. Sama halnya dengan tingkat buta huruf penduduk perempuan Kota Binjai dengan selisih 0,79 persen. Hal yang cukup menarik adalah tingginya tingkat buta huruf perempuan dibanding laki-laki.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

<https://binjaikota.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

Secara teori, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Penduduk yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertumbuhan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014,2015&2017

Kegiatan	2014		2015		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan kerja	120 311	63,85	125 172	65,44	122 234	62,03
- Bekerja	111 172	59,00	112 661	58,90	114 955	58,33
- Pengangguran	9 139	4,85	12 511	6,54	7 279	3,70
Bukan Angkatan kerja	68 113	36,15	66 115	34,56	74 828	37,97
Jumlah	188 424	100	191 287	100	197 062	100
T P A K (%)	63,85		65,44		62,03	
TPT (%)	7,60		10,00		4,50	

Sumber : Sakernas Agustus 2014,2015&2017

6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di Binjai adalah 197.062 orang, terdiri dari 122.234 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 74.828 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja. TPAK Binjai 2017 adalah sebesar 62,03 persen, artinya bahwa pada tahun 2017 sebanyak 62,03 persen penduduk usia kerja di Binjai siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Binjai menunjukkan kecenderungan berfluktuatif. Pada tahun 2014, TPAK Binjai 63,85 persen, kemudian naik menjadi 65,44 persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 62,03 persen.

6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 di Binjai sebesar 5,95 persen, menurun dibanding tahun 2015 (10,00 persen) demikian juga dibanding Tahun 2014 (7,60 persen).

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Serta TPT dan TPAK, 2017

Kota/Kota	Angkatan kerja			Bukan Angkatan	Penduduk 15+	TPT	TPAK
	Bekerja	Pengangguran	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten							
1..Nias	66 519	799	67 318	15 343	82 661	1.19	81.44
2..Mandailing Natal	206 104	12 564	218 668	67 401	286 069	5.75	76.44
3. Tapanuli Selatan	134 172	8 258	142 430	38 476	180 906	5.80	78.73
4. Tapanuli Tengah	145 434	11 609	157 043	72 756	229 799	7.39	68.34
5. Tapanuli Utara	160 853	3 099	163 952	29 102	193 054	1.89	84.93
6. Toba Samosir	94 531	2 107	96 638	23 704	120 342	2.18	80.30
7. Labuhanbatu	167 225	12 769	179 994	140 563	320 557	7.09	56.15
8. Asahan	296 759	18 759	315 518	177 441	492 959	5.95	64.00
9. Simalungun	393 218	23 416	416 634	183 453	600 087	5.62	69.43
10. Dairi	154 801	2 237	157 038	24 086	181 124	1.42	86.70
11. Karo	215 127	2 911	218 038	61 254	279 292	1.34	78.07
12. Deli Serdang	911 873	59 889	971 762	511 172	1 482 934	6.16	65.53
13. Langkat	469 995	17 425	487 420	232 252	719 672	3.57	67.73
14. Nias Selatan	152 425	1 972	154 397	39 075	193 472	1.28	79.80
15. Humbang	101 908	322	102 230	14 287	116 517	0.31	87.74
16. Pakpak Barat	26 425	131	26 556	2 779	29 335	0.49	90.53
17. Samosir	71 259	923	72 182	9 037	81 219	1.28	88.87
18. Binjai	268 487	17 090	285 577	140 645	426 222	5.98	67.00
19. Batubara	173 962	9 155	183 117	94 022	277 139	5.00	66.07
20. Padang Lawas Utara	123 523	4 099	127 622	35 595	163 217	3.21	78.19
21. Padang Lawas	113 192	5 006	118 198	50 143	168 341	4.24	70.21
22. Labuhanbatu	132 886	8 009	140 895	71 717	212 612	5.68	66.27
23. Labuhanbatu Utara	139 744	9 470	149 214	87 966	237 180	6.35	62.91
24. Nias Utara	59 289	1 629	60 918	21 795	82 713	2.67	73.65
25. Nias Barat	43 486	541	44 027	8 442	52 469	1.23	83.91
Kota							
71. Sibolga	38 509	3 942	42 451	16 962	59 413	9.29	71.45
72. Tanjungbalai	76 233	4 438	80 671	33 814	114 485	5.50	70.46
73. Pematangsiantar	111 746	10 776	122 522	60 008	182 530	8.80	67.12
74. Tebing Tinggi	66 105	7 122	73 227	42 356	115 583	9.73	63.35
75. Medan	972 274	101 634	1 073 908	594 983	1 668 891	9.46	64.35
76. Binjai	114 955	7 279	122 234	74 828	197 062	5.95	62.03
77. Padangsidimpuan	101 644	3 993	105 637	43 435	149 072	3.78	70.86
78. Gunungsitoli	61 326	3 915	65 241	27 194	92 435	6.00	70.58
Sumatera Utara	6 365 989	377 288	6 743 277	3 046 086	9 789 363	5,60	68,88

Sumber : Sakernas Agustus 2017

Hal yang cukup menarik jika mencermati TPT menurut kabupaten/kota, daerah kota umumnya memiliki TPT relatif tinggi dan umumnya diatas atau mendekati 10 persen, sebaliknya di daerah kabupaten umumnya rendah. TPT tertinggi terdapat di Kota Tebing Tinggi yaitu sebesar 9,73 persen dan yang terendah adalah TPT Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,31 persen. Hal ini dapat dipahami bahwa di kabupaten pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda di kota dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.

6.3. Karakteristik Penduduk Bekerja

6.3.1. Lapangan Pekerjaan

Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi penyerapan tenaga kerja di Kota Binjai. Pada tahun 2017 sebanyak 69,83 persen penduduk Binjai berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor jasa, kemudian diikuti sektor manufaktur (meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, air dan gas dan konstruksinya) sebesar 22,28 persen, dan yang paling sedikit di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 7,89 persen.

6.3.2. Status Pekerjaan

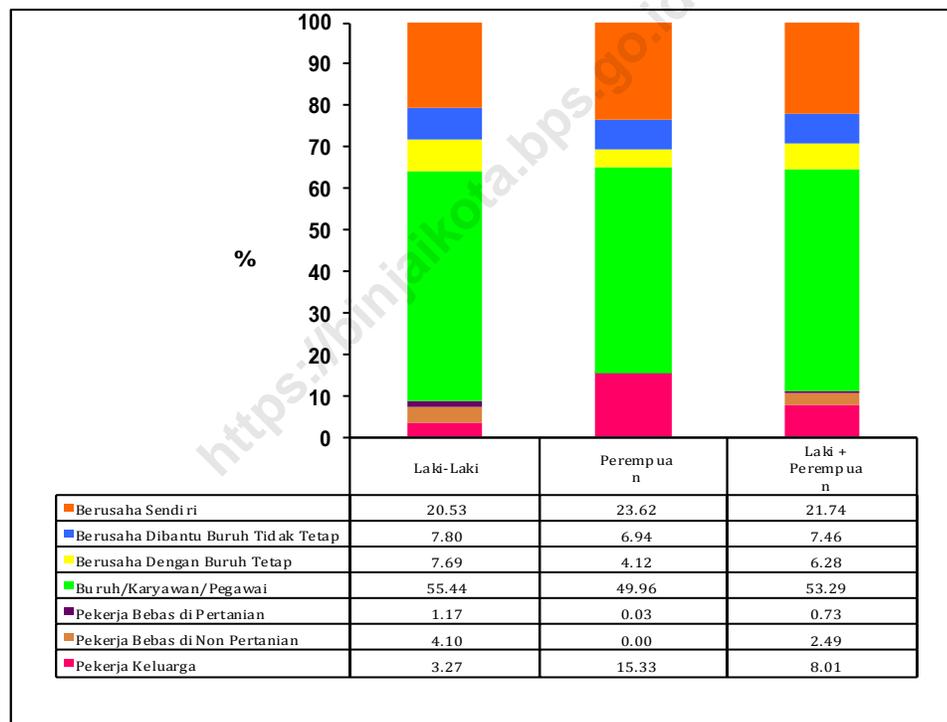
Status pekerjaan dibedakan menjadi 6 macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian serta pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga). Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif '*tradisional*'. Sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern, lebih banyak buruh atau karyawan dan

pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama di kalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

Pada umumnya penduduk Kota Binjai bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Grafik 6.1. menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sebanyak 53,29 persen pekerja di Kota Binjai berstatus buruh/karyawan, kemudian diikuti oleh berusaha sendiri (21,74 persen). Jika dilihat menurut gender, persentase penduduk laki-laki yang menjadi pekerja keluarga sangat sedikit yaitu hanya 3,27 persen sementara persentase penduduk perempuan yang menjadi pekerja keluarga cukup tinggi yaitu 15,33 persen.

Grafik 6.1. Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Status Pekerjaan, 2017



Sumber : Sakernas Agustus 2017

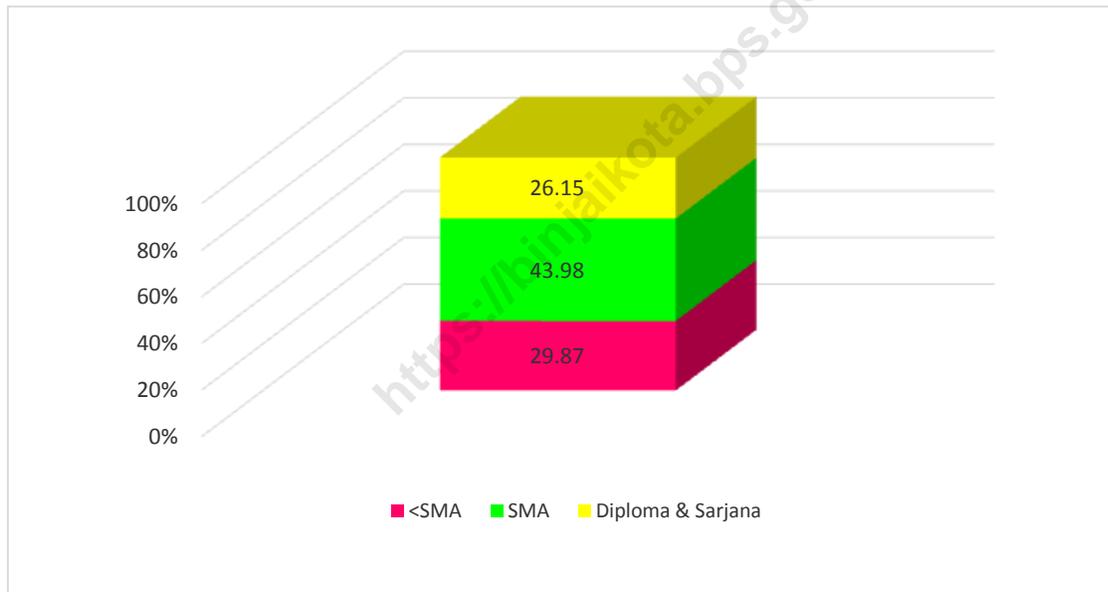
6.3.3. Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih dipakai sebagai patokan untuk mengelompokkan seorang pekerja, apakah ia termasuk pekerja profesional atau pekerja kasar. Seorang pekerja dikatakan sebagai pekerja profesional (white collar worker) bila suatu pekerjaan

yang untuk menyelesaikannya memerlukan penguasaan dan penerapan teori ilmu pengetahuan. Sebaliknya dikatakan pekerja kasar (*blue collar worker*) bila suatu pekerjaan hanya memerlukan tenaga atau ketrampilan tertentu.

Grafik 6.2. menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penduduk bekerja di Kota Binjai didominasi oleh penduduk yang mempunyai pendidikan tertinggi SMA, yaitu sebesar 43,98 persen. Kemudian penduduk yang pendidikan tertinggi Diploma/Universitas sebesar 26,15 persen, pendidikan tertinggi SMP sebesar 17,13 persen, dan tidak/belum pernah sekolah sebesar 12,75 persen.

Grafik 6.2. Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Pendidikan yang ditamatkan, 2017



Sumber : Sakernas Agustus 2017

BAB VI
TARAF & POLA
KONSUMSI

<https://binjaya.ta.br/10.id>

TARAF DAN POLA KONSUMSI

7.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Binjai terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2017 sebesar Rp. 820.055,-, terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 441.466,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp. 378.589,-. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Binjai masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan).

Tabel 7.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

Daerah	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Utara	489 737	58,01	354 426	41,99	844 163	100
Binjai	441 466	53,83	354 426	46,17	820 055	100

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga di daerah perdesaan di Sumatera Utara lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 64,19 persen untuk daerah perdesaan dan 53,62 persen untuk daerah perkotaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah perdesaan masih cenderung menggunakan pendapatan rumah tangganya untuk keperluan konsumsi makanan. Sedangkan di daerah perkotaan, porsi untuk konsumsi makanan sudah mulai dialihkan kepada keperluan lain di luar konsumsi makanan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan relatif lebih baik dibanding di perdesaan.

Persentase pengeluaran untuk makanan di daerah kabupaten relatif lebih tinggi dibandingkan daerah kota. Persentase tertinggi di Kabupaten Padang Lawas (68,84 persen), diikuti Kabupaten Karo (65,91 persen) dan Kabupaten Dairi (65,46 persen). Sedangkan persentase pengeluaran untuk makanan terendah terdapat di Kota Medan (48,47 persen) dan Kota Pematangsiantar (52,73 persen).

Tabel 7.2. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2017

Kota/kota	Makanan	Bukan	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Nias	64.62	35.38	100,00
2. Mandailing Natal	64.54	35.46	100,00
3. Tapanuli Selatan	64.73	35.27	100,00
4. Tapanuli Tengah	60.60	39.40	100,00
5. Tapanuli Utara	61.97	38.03	100,00
6. Toba Samosir	60.23	39.77	100,00
7. Labuhanbatu	59.71	40.29	100,00
8. Asahan	58.81	41.19	100,00
9. Simalungun	62.33	37.67	100,00
10. Dairi	65.46	34.54	100,00
11. Karo	65.91	34.09	100,00
12. Deli Serdang	59.57	40.43	100,00
13. Langkat	60.60	39.40	100,00
14. Nias Selatan	63.19	36.81	100,00
15. Humbang Hasundutan	61.31	38.69	100,00
16. Pakpak Barat	63.45	36.55	100,00
17. Samosir	61.99	38.01	100,00
18. Binjai	60.11	39.89	100,00
19. Batubara	61.68	38.32	100,00
20. Padang Lawas Utara	64.26	35.74	100,00
21. Padang Lawas	68.84	31.16	100,00
22. Labuhanbatu Selatan	61.87	38.13	100,00
23. Labuhanbatu Utara	61.81	38.19	100,00
24. Nias Utara	62.39	37.61	100,00
25. Nias Barat	65.17	34.83	100,00
71. Sibolga	57.56	42.44	100,00
72. Tanjungbalai	64.50	35.50	100,00
73. Pematangsiantar	52.73	47.27	100,00
74. Tebing Tinggi	57.21	42.79	100,00
75. Medan	48.47	51.53	100,00
76. Binjai	53.83	46.17	100,00
77. Padangsidempuan	55.24	44.76	100,00
78. Gunungsitoli	56.12	43.88	100,00
Sumatera Utara	58,01	41,99	100,00
• Perkotaan	53,62	46,38	100,00
• Perdesaan	64,19	35,81	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

BAB VIII

PERUMAHAN

<https://binjaikol.com/ps-9014>

PERUMAHAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

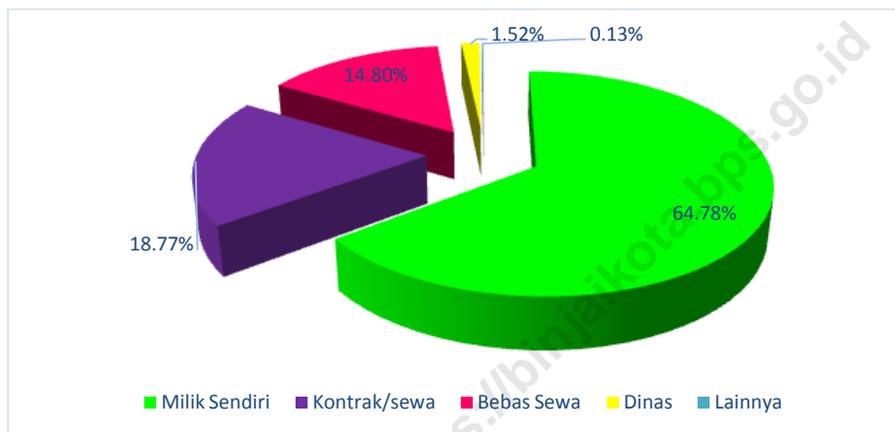
Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

8.1. Kondisi Rumah Tinggal

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditematinya. Dalam beberapa analisis juga dijadikan sebagai pendekatan indikator *backlog* perumahan.

Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kota Binjai, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Berdasarkan informasi pada Grafik 8.1, mayoritas rumah tangga di Binjai yakni mencapai sekitar dua per tiga (64,78 persen) mendiami rumah milik sendiri, kemudian 18,77 persen mendiami rumah kontrak/sewa, 14,80 persen mendiami rumah bebas sewa, 1,52 persen mendiami rumah dinas dan 0,13 persen lainnya. Masih besarnya persentase rumah tangga yang belum mendiami rumah milik sendiri inilah yang sering digunakan sebagai acuan dalam target penyediaan rumah di Binjai maupun nasional.

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah antara lain jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok) dan jenis atap (asbes/seng/genteng). ketiga indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan kesehatan anggota

rumah tangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Secara umum, semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Tabel. 8.1. Kondisi Perumahan di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

Uraian	Sumatera Utara	Binjai
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Rata-rata luas lantai perkapita (M ²)	22,25	24,22
2. Rumah tangga dengan lantai bukan tanah (%)	98,11	99,56
3. Rumah tangga dengan dinding rumah Tembok (%)	63,29	90,94
4. Rumah tangga dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes (%)	99,04	97,67

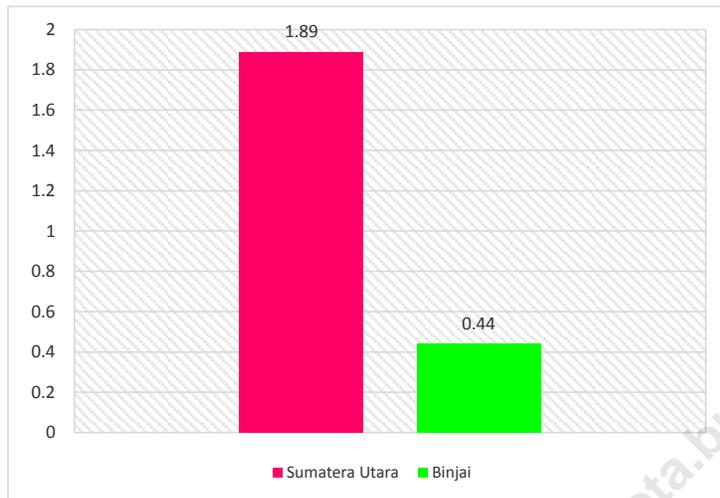
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Sumatera Utara menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai per kapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumah tangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumah tangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2017 rata-rata rumah tangga di Binjai memiliki luas lantai per kapita sekitar 24,22 m², sudah diatas Sumatera Utara yang memiliki luas lantai per kapita sekitar 22,25 m².

Selain luas lantai, jenis lantai terluas merupakan indikator kesejahteraan. Jenis lantai terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada grafik 8.2. diketahui bahwa sekitar 0,44 persen rumah tangga di Kota Binjai masih tinggal di rumah dengan lantai tanah, walaupun kondisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 1,89 persen. Kondisi yang

memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah perdesaan, sebab masih 3,36 persen rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat.

Grafik 8.2. Persentase Rumahtangga yang Mempunyai Lantai Terlalu Terbuat dari Tanah di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah adalah jenis dinding dan atap. Pada tahun 2017, sekitar 90,94 persen rumah tangga di Kota Binjai tinggal di rumah dengan dinding tembok. Selain tembok bahan lain yang cukup dominan adalah kayu yakni sekitar 6,59 persen. Hampir seluruhnya atau sekitar 99,04 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan atap seng, asbes, genteng, dan beton.

8.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama di antaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan

tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rumah tangga pengguna listrik semakin meningkat. Pada tahun 2017 sebanyak 99,78 persen rumah tangga di Binjai menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN, sedangkan rumah tangga di Sumatera Utara menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN sebesar 97,42 persen. Hal ini menandakan kondisi Kota Binjai lebih baik dibanding Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 8.2. Kondisi Fasilitas Rumah di Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

Uraian	Sumatera Utara	Binjai
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)	97,42	99,78
Rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air sendiri (%)	83,81	94,89

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Selain itu, 94,89 persen rumah tangga di Kota Binjai memiliki fasilitas tempat buang air sendiri, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara hanya 83,81 persen yang memiliki fasilitas tempat buang air sendiri, sisanya adalah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air, menggunakan fasilitas umum, ataupun berbagi dengan rumah tangga lain.

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

Sumber Air Minum	Sumatera Utara	Binjai
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Air kemasan bermerk	3,51	4,10
2. Air isi ulang	32,24	60,52

3. Ledeng	14,12	5,59
4. Sumur Bor/Pompa	19,42	7,08
5. Sumur terlindungi	10,51	21,37
6. Sumur tdk terlindungi	0,61	4,83
7. Mata Air terlindung	8,27	0,73
8. Mata Air tidak terlindungi	2,97	-
9. Air Permukaan/Hujan	4,01	-
10. Lainnya	0,12	-

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Sebagian besar rumah tangga di Kota Binjai menggunakan sumber air minum dari air isi ulang yaitu mencapai 60,52 persen dan sumur terlindungi 21,37 persen. Di Provinsi Sumatera Utara, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air isi ulang (32,24 persen) lebih sedikit dibandingkan Kota Binjai, berbeda dengan penggunaan air ledeng dimana penggunaannya di Kota Binjai lebih sedikit (5,59 persen) dibanding Provinsi Sumatera Utara (14,12 persen). Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari bor/pompa, untuk Kota Binjai lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara.

Selain sumber air minum dan listrik, fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki septik merupakan pilihan terbanyak rumah tangga di Kota Binjai yaitu sebesar 96,20 persen, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara lebih rendah yaitu sebesar 83,69 persen. Selain itu di Kota Binjai masih terdapat sekitar 0,50 persen tempat penampungan di lobang tanah/pantai/tanah lapang/kebun serta 2,24 persen tempat penampungan di kolam/sawah/sungai/danau/laut.

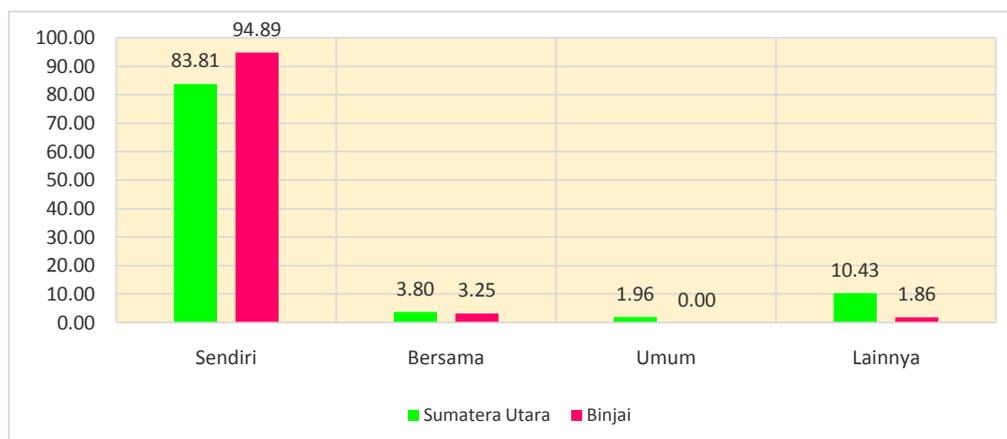
Tabel 8.4. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017

Tempat Penampungan Kotoran/tinja	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
1. Tangki Septik/SPAL	83,69	96,20
2. Kolam/sawah/Sungai/Danau/Laut	4,46	2,24
3. Lobang Tanah/Pantai/Tanah Lapang, Kebun	10,39	0,50
4. Lainnya	1,47	1,07
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga di Binjai sudah mempunyai fasilitas sendiri (94,89 persen). Di Sumatera Utara, rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri jauh lebih kecil (83,81 persen) dibandingkan Kota Binjai.

Grafik 8.3. Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

BAB IX

KEMISKINAN

<https://binjaikota.bengkulu.go.id>

KEMISKINAN

9.1. Perkembangan Penduduk Miskin

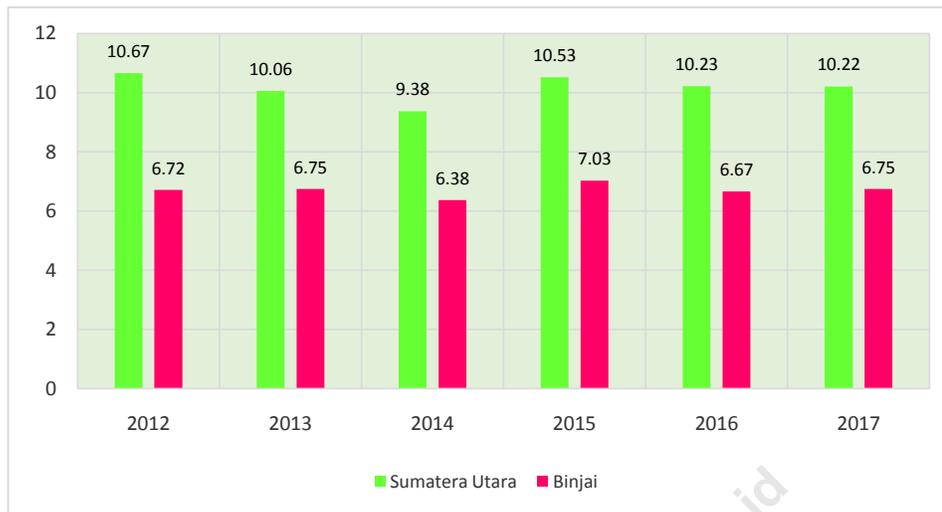
Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kcal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Binjai beberapa tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin di Binjai sekitar 6,72 persen. Angka ini kemudian meningkat menjadi 6,75 persen pada tahun 2013, menurun lagi pada tahun 2014 menjadi 6,38 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 7,03, pada tahun 2016 menurun menjadi 6,67 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 6,75.

Grafik 9.1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2012-2017



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data pada Tabel 9.1. Pada tahun 2017, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Binjai lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan.

Tabel 9.1. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan
 Indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai,
 2017

Indeks	Sumatera Utara	Binjai
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Indeks kedalaman kemiskinan (P_1)	1,71	1,11
Indeks keparahan kemiskinan (P_2)	0,44	0,34

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

<https://binjaikota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BINJAI**

Jl. WR. Mongonsidi No. 22 Binjai 20714

Telp. (061) 8826571, Fax: (061) 8821146

Homepage: <http://www.binjakota.bps.go.id>, E-mail : bps1276@bps.go.id

ISBN 978-602-60683-4-7



9 786026 068347